

KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI DESA DI DESA BOJONGMENGGER KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Novi Sopia¹, R. Didi Djadjuli², Imam Maulana Yusuf³

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3}
E-mail : novisopia05@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal ini diketahui dari Rendahnya kemampuan pengelola bumdes dalam mengembangkan unit usaha sehingga tidak ada peningkatan terhadap unit usaha yang ada di BUMDes, Rendahnya kemampuan pengelola bumdes dalam memanfaatkan/ mengelola potensi desa, Tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh pengelola bumdes untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat dalam mengembangkan BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data atau analisis data penelitian ini yaitu, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari Penelitian yang dilakukan masih terdapat beberapa hambatan, yaitu minimnya modal yang dimiliki BUMDes dalam mengembangkan usahanya, belum adanya pelatihan yang diberikan kepada pengurus, dan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDes kepada masyarakat. Untuk mengatasi hambatan dilakukan berbagai upaya, dengan membagi hasil keuntungan yang didapat dalam unit usaha warung bumdes untuk menambah modal usaha untuk pengembangan unit usaha yang baru, adanya pelatihan yang diberikan kepada pengurus, dan adanya sosialisai yang dilakukan oleh BUMDes kepada masyarakat.

Kata Kunci : Kinerja, BUMDes, Ekonomi Desa.

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi di suatu daerah hanya dimungkinkan karena ekonomi pedesaan yang kuat berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini memastikan bahwa tata pemerintahan yang baik diterapkan di semua tingkat pembangunan didasarkan pada

kebutuhan nyata masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.

Pemerintah telah lama mengembangkan ekonomi pedesaan melalui berbagai program. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Salah satu

faktor yang paling penting adalah intervensi pemerintah yang terlalu banyak sehingga justru menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat pedesaan dalam mengelola dan menjalankan mekanisme ekonomi pedesaan.

Menurut Undang- Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, definisi dari desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah, yang berwenang dalam mengatur urusan pemerintah dengan kepentingan masyarakat setempat berdasar aturan bersama dengan masyarakat hak, asal – usul / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Desa maju memang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan untuk membentuk desa tangguh, desa maju, desa mandiri, dan desa demokratis. Keempat aspek tersebut tentunya menjanjikan untuk menjadi dasar penguatan desa yang berwawasan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Dalam pembangunan dan pengembangan aspek ekonomi desa diatur oleh Badan Usaha Milik Desa yang biasa dikenal dengan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. BUMDes adalah peraturan pemerintah untuk menekan kemandirian desa.

Dengan adanya BUMDes, diharapkan dengan mengembangkan kapasitas masyarakat desa menjadi lebih mandiri. Selain itu, dapat berkembang dengan menawarkan inovasi-inovasi unik dengan ciri khas tersendiri. Hal ini karena BUMDes sendiri memiliki syarat bahwa dana dan

kekuatan usahanya berasal dari kekayaan desa sendiri. BUMDes dibentuk untuk menampung berbagai kegiatan ekonomi di desa, baik yang dikembangkan menurut adat dan budaya masyarakat setempat, maupun yang diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah dan daerah dalam bentuk program dan proyek. pemerintah.

BUMDes “Bojongmengger” adalah Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, yang merupakan lembaga milik desa yang dikelola oleh masyarakat Desa Bojongmengger.

BUMDes Bojongmengger didirikan pada tahun 2016 yang dikukuhkan dengan Perdes No 4 Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Desa Tahun 2016. BUMDes Bojongmengger dibentuk untuk menjadi sebuah badan usaha masyarakat desa sebagai wadah untuk masyarakat desa secara bersama – sama menggali segala potensi yang ada di Desa Bojongmengger untuk dikembangkan guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat pedesaan khususnya untuk membantu dalam program peningkatan ekonomi nasional.

Keberadaan BUMDes di Desa Bojongmengger saat ini belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan unit usaha yang ada di BUMDes Bojongmengger tidak ada perkembangan. Unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Bojongmengger melalui keberadaan

BUMDes saat ini adalah “Warung FC Bumdes” yang menjual berbagai jenis keperluan rumah tangga dan alat tulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bojongmengger.

Akan tetapi, BUMDes di Desa Bojongmengger masih tidak menunjukkan peningkatan terhadap unit usaha yang ada. sejak BUMDes berdiri pada akhir Desember Tahun 2016 unit usaha yang ada hanya satu yaitu “Warung FC Bumdes”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di BUMDes Bojongmengger kecamatan cijeungjing kabupaten ciamis, maka permasalahannya yaitu kinerja badan usaha milik desa sebagai penggerak ekonomi desa masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator- indikator masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan pengelola bumdes dalam mengembangkan unit usaha sehingga tidak ada peningkatan terhadap unit usaha yang ada di BUMDes.
Contohnya : Hal ini terlihat dari unit usaha yang tidak berkembang, unit usaha yang ada di BUMDes Bojongmengger hanya ada satu yaitu “Warung FC Bumdes” saja.
2. Rendahnya kemampuan pengelola bumdes dalam memanfaatkan/ mengelola potensi desa sebagai peluang usaha bagi bumdes.
Contohnya : Pengelola BUMDes belum menetapkan strategi yang terarah untuk menggaet potensi lainnya seperti bidang usaha lainnya seperti pertanian, UMKM, dan

bidang jasa lainnya yang dapat dikembangkan oleh bumdes.

3. Tidak adanya komunikasi yang dilakukan oleh pengelola bumdes untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, ataupun masyarakat dalam mengembangkan BUMDes.

Hal ini sejalan Menurut Mangkunegara (2009 :10) bahwa Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mitchell (Sedarmayanti, 2009 : 51) Menjelaskan beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

1. *Quality Of Work* (Kualitas Hasil Pekerjaan), yaitu wujud perilaku dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. *Promptness* (Kecepatan Atau Ketangkasan), menunjukkan waktu yang diperlakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
3. *Initiative* (Inisiatif), yaitu yaitu yang mempunyai kesadaran diri untuk melakukan sesuatu dalam melaksanakan tugas –tugas dan tanggungjawab.
4. *Capability* (Kemampuan), yaitu berhubungan bagaimana kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh bawahan dan bagaimana kemampuan dalam

memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada.

5. *Communication* (Komunikasi), adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan sesama rekan sekerja maupun lingkungannya yang berguna untuk mendukung aktivitas pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu Kinerja Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 (orang), terdiri dari 1 orang Kepala Desa Bojongmengger, 1 orang Pengawas BUMDes, 1 orang ketua Badan Permusyawaratan Desa. 1 orang Ketua LPM, 1 orang Direktur BUMDes, dan 3 orang Masyarakat Desa Bojongmengger. Teknik pengolahan data / analisis data melalui redaksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar permasalahannya ialah terkait dengan Kinerja Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

1. Dimensi *Quality Of Work* (Kualitas Hasil Kerja)

Kualitas kerja merupakan suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia atau sumber daya lainnya dalam pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Dalam artian, Kualitas hasil kerja merupakan salah satu ciri kinerja pegawai dilaksanakan dengan maksimal. Sebab jika pekerjaan dilaksanakan secara asal – asalan, maka otomatis pekerjaan itu juga tidak berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian dalam dimensi *Quality Of Work* (Kualitas hasil kerja) pelaksanaannya belum optimal, berdasarkan indikator sebagai alat ukurnya seperti belum adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BUMDes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan belum adanya pemahaman dari pengelola dalam menjalankan program kerja yang ada di BUMDes. Adanya faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang belum berkompeten dalam menjalankan tugasnya dan minimnya dan minimnya pemahaman dari pengelola BUMDes yang menyebabkan kinerja BUMDes belum berjalan dengan optimal sehingga keberadaan BUMDes belum terasa manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya penguatan kapasitas pengelola untuk menunjang kemajuan BUMDes tersebut. Hal ini ada ketidaksesuaian dengan pendapat Matutina (2011 :: 205) “Kualitas

(*quality*) sumber daya manusia sendiri mengacu pada pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kemampuan (*abilities*)”.

Berdasarkan teori diatas, ada ketidaksesuaian dengan pendapat ahli, dimana minimnya pengetahuan pengelola BUMDes dalam menjalankan program kerja sehingga program kerja yang dijalankan belum berjalan dengan maksimal. Kemudian pengelola BUMDes belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga keberadaan BUMDes belum terasa manfaatnya oleh masyarakat.

2. Dimensi *Promptness*

(Kecepatan / Ketangkasan)

Promptness atau kecepatan / ketangkasan menunjukkan waktu yang diperlakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. *Promptness* berkaitan dengan sesuai tidaknya waktu penyelesaian pekerjaan dengan target waktu yang direncanakan. Dengan demikian setiap pekerjaan diusahakan untuk selesai sesuai dengan rencana agar tidak mengganggu pada pekerjaan yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi *Promptness* (kecepatan atau ketangkasan) pelaksanaanya sudah berjalan dengan optimal, berdasarkan indikator sebagai alat ukur seperti pengelola BUMDes dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan pengelola BUMDes dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan demikian hasil penelitian sudah sesuai

dengan teori pendapat ahli diatas bawa pelaksanaan dimensi *Promptness* (kecepatan atau ketangkasan) sudah berjalan dengan optimal, dimana adanya respon cepat yang dilakukan oleh pengurus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pekerjaan yang terealisasi sesuai target karena sudah adanya jadwal pada masing –masing pekerjaan yang harus diselesaikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soedarsono (2014 : 86) mengemukakan bahwa “*Promptness* atau kecepatan atau ketepatan, menunjukkan waktu yang diperlakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan”.

Dengan demikian hasil penelitian sudah sesuai dengan teori pendapat ahli diatas bawa pelaksanaan dimensi *Promptness* (kecepatan atau ketangkasan) sudah berjalan dengan optimal, dimana pengelola BUMDes sudah bisa menyelesaikan pekerjaanya dengan cepat sesuai dengan target.

3. Dimensi *Initiative* (inisiatif)

Inisiatif yaitu kemampuan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi kesulitan, kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tanpa bantuan, kemampuan untuk mengambil tahapan pertama dalam kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi *Initiative* (Inisiatif) pelaksanaanya belum berjalan dengan optimal dengan berdasarkan indikator sebagai alat ukur seperti belum adanya ide/gagasan dalam mengembangkan BUMDes dan belum adanya kemandirian dalam

mengembangkan BUMDes. Hal ini terlihat dari belum adanya ide/ gagasan yang terealisasi atas pengembangan usaha BUMDes dan belum adanya kemandirian dalam mengembangkan BUMDes. Hal ini terlihat dari masih adanya intervensi dari pemerintah desa dalam menjalankan program kerja bumdes. Diantaranya BUMDes masih ketergantungan dari modal yang diberikan oleh pemerintah desa, dimana modal tersebut bersumber dari dana desa yang jumlahnya tidak menentu dalam setiap tahunnya. Sehingga ketika tidak ada penyertaan modal yang diberikan oleh desa maka usaha yang ada di BUMDes tidak akan berkembang. Hal ini ada ketidaksesuaian dengan pendapat Soedarsono (2014 :12) menyatakan bahwa :

Inisiatif menunjukkan apresiasi seseorang terhadap pekerjaannya dengan berusaha mencari, menemukan, dan mengembangkan metode- metode yang efektif untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hasil yang gemilang.

Berdasarkan teori diatas menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian dengan pendapat ahli, dimana BUMDes belum bisa mengembangkan ide untuk dijadikan peluang usahanya dan juga belum bisa mencari modal sendiri karena sampai saat ini BUMDes masih ketergantungan dengan pemberian modal dari desa.

4. Dimensi *Capability* (Kemampuan)

Kemampuan individu adalah kesanggupan atau kecakapan yang

berarti bahwa seseorang yang memiliki kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerja. *Capability* (Kemampuan), yaitu berhubungan bagaimana kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh bawahan dan bagaimana kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya atau potensi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi *Capability* (Kemampuan) pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dengan berdasarkan indikator sebagai alat ukur seperti belum adanya kemampuan dalam mengembangkan unit usaha yang ada di BUMDes dan belum adanya kemampuan dalam memanfaatkan potensi desa sebagai peluang usaha. Hal ini terlihat dari belum adanya penambahan unit usaha di BUMDes dalam setiap tahunnya dan usaha yang dikembangkan baru ada satu kemudian pengelola BUMDes belum bisa menggaet potensi yang ada di desa untuk dikelola menjadi bagian dari usaha BUMDes padahal potensi yang ada di desa banyak namun belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Hal ini terdapat ketidaksesuaian dengan pendapat Sedarmayanti (2017 : 35) menyatakan bahwa :

Capability berhubungan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki dan bagaimana kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya / potensi yang ada.

Berdasarkan teori diatas menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian

dengan pendapat ahli, dimana BUMDes belum memiliki kemampuan untuk mengelola potensi desa yang dapat dimanfaatkan menjadi bagian usaha dari BUMDes.

5. Dimensi *Communication* (Komunikasi)

Komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan sesama rekan sekerja maupun lingkungannya yang berguna untuk mendukung aktivitas pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan dimensi *Communication* (Komunikasi) pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal berdasarkan indikator sebagai alat ukur seperti belum adanya komunikasi yang dilakukan untuk bekerjasama dengan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dan juga belum adanya arahan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini terlihat dari belum adanya kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes bersama pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan belum adanya arahan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini disebabkan oleh belum adanya relasi yang dimiliki BUMDes untuk bekerja sama dengan pihak luar dan minimnya keterlibatan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga sampai saat ini belum ada keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya BUMDes. Hal ini ada ketidaksesuaian dengan pendapat Soedarsono (2014 : 86) mengemukakan bahwa :

Komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan sesama rekan sekerja maupun lingkungannya yang berguna untuk mendukung aktivitas pekerjaan.

Berdasarkan teori diatas menyatakan bahwa ada ketidaksesuaian dengan pendapat ahli, dimana pengelola BUMDes belum ada bekerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan BUMDes sehingga sampai saat ini BUMDes Bojongmengger belum bisa berkembang dikarenakan belum ada kerja sama yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Kinerja Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Di Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Dimana keberadaan BUMDes masih belum terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini karena kurangnya dukungan terhadap BUMDes, potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga menyulitkan pengelola BUMDes di masyarakat setempat untuk mengembangkan BUMDes karena dukungan dana yang relatif kecil untuk BUMDes setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes, dan masyarakat agar dapat berkontribusi untuk kemajuan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Mangkunegara. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Matutina. (2011). *Manajemen Sumber Dayan Manuia*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Cv Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, Dan Produktivitas*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Soedarsono. (2014). *Kearifan Lingkungan : Dalam Perspektif Budaya Jawa*. Keputusan Kepala Desa Tahun 2016 Perdes No 4 Tahun 2016
- Undang – Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.